

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2010). Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, maka jumlah penduduk miskin menjadi semakin berkurang (Widodo, Waridin, & Kodoatie, 2011). Berkurangnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan tercapainya tujuan dari pembangunan ekonomi.

Indonesia merupakan negara berkembang, dan salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, jumlah dan persentase penduduk miskin masih cenderung tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan (Zuhdiyati & Kaluge, 2017). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang tergolong besar. Hal ini salah satu disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia. Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut menjadikan masalah utama pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang harus diperbaiki.

Tabel 1-1 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meski cenderung mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan perlu adanya kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	
	(ribu jiwa)	(persen)
2011	5256,00	16,21
2012	4863,50	14,98
2013	4811,30	14,44
2014	4561,82	13,58
2015	4577,00	13,58
2016	4506,89	13,27
2017	4450,72	13,01
2018	3897,20	11,32
2019	3743,23	10,80
2020	3980,90	11,41

Sumber: BPS Jawa Tengah

Salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan adalah terbatasnya lapangan kerja (Sudiharta & Sutrisna, 2014). Semakin banyak jumlah penduduk bekerja, semakin banyak pula penduduk yang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga jumlah penduduk miskin berkurang. Jumlah penduduk miskin akan terus meningkat apabila peningkatan angkatan kerja tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup.

Tabel 1-2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2020 cenderung meningkat, dan jumlah penduduk penduduk menganggur berkurang hingga tahun 2019. Meski demikian, bisa dikatakan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang banyak. Menurut BPS (2020), meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan di banyak provinsi lainnya diakibatkan oleh virus *Covid-19* yang membuat banyak perusahaan melepas pegawainya.

**Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran, dan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020 (Jiwa)**

<b>Tahun</b>	<b>Bekerja</b>	<b>Pengangguran</b>	<b>Angkatan Kerja</b>
2011	15.822.765	1.203.342	17.026.107
2012	16.531.395	982.093	17.513.488
2013	16.469.960	1.054.062	17.524.022
2014	16.550.682	996.344	17.547.026
2015	16.435.142	863.783	17.298.925
2016	16.511.136	801.330	17.312.466
2017	17.186.674	823.938	18.010.612
2018	17.413.869	815.083	18.228.952
2019	17.602.917	818.276	18.421.193
2020	17.536.935	1.214.342	18.751.277

Sumber: BPS Jawa Tengah

Kesempatan kerja berkaitan erat dengan modal manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Modal manusia merupakan investasi pada diri manusia yang mencakup pendidikan dan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas (Todaro & Smith, 2011). Tingginya produktivitas menandakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan barang dan jasa secara efisien, sehingga peningkatan produktivitas akan meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan. Menurut Suhendra (2020), seseorang dengan modal manusia yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan serta memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

**Tabel 1. 3 Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020**

<b>Tahun</b>	<b>AHH</b>	<b>RLS</b>
2011	72,91	6,74
2012	73,09	6,77
2013	73,28	6,80
2014	73,88	6,93
2015	73,96	7,03
2016	74,02	7,15
2017	74,08	7,27
2018	74,18	7,35
2019	74,23	7,53
2020	74,37	7,69

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 1-3 menunjukkan bahwa AHH dan RLS di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2020 cenderung mengalami peningkatan. Namun, RLS di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat pendidikan suatu daerah akan menjadi permasalahan besar dalam pembangunan ekonomi, karena pendidikan yang rendah dapat berdampak pada buruknya kualitas sumber daya manusia, yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan RLS dan AHH diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Meski jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2020 cenderung menurun, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih banyak. Pemerintah perlu mengambil langkah serta kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kesempatan kerja. Telah ditampilkan di latar belakang bahwa jumlah penduduk manganggur di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang banyak. Hal tersebut diduga karena rendahnya pendidikan, yang tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah yang hanya mencapai tujuh tahun.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup terhadap jumlah penduduk bekerja, dan pengaruh jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020 dengan menggunakan regresi data panel dan pendekatan kaidah rantai (*chain rule*) pada diferensial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah mampu memberikan informasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait masalah kemiskinan. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam urutan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori mengenai hubungan antarvariabel pada penelitian ini. Kemudian, bab ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu, dan di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji pendukungnya, definisi operasional variabel, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil analisis data menginterpretasikan hasil regresi, dan menjelaskan interpretasi ekonomi dari hasil regresi.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, serta keterbatasan penelitian ini.